

**FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN  
DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**LATHIFAH FEBRIN PUTRI MAHESWARI**

**20103070110**

**PEMBIMBING :**

**DR. OCKTOBERRINSYAH, M. AG.**

**19681020 199803 1 002**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-737/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LATHIFAH FEBRIN PUTRI MAHESWARI  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070110  
Telah diujikan pada : Selasa, 23 Juli 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 66b583d9542fd



Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 66af823661a13



Penguji II

Proborini Hastuti, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66b1bc0abb544



Yogyakarta, 23 Juli 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66b9c0af694ca2

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Lathifah Febrin Putri Maheswari  
NIM : 20103070110  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Fungsi Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dalam Perspektif Islam”**. Merupakan hasil penelitian saya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu didalam naskah skripsi ini dan disebutkan didalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 Mei 2024

Penyusun



Lathifah Febrin Putri Maheswari  
(20103070110)

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi  
Lamp : -  
Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta  
*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta memberikan saran perbaikan, maka kami selaku pembimbing berkesimpulan bahwa skripsi saudara :

Nama : Lathifah Febrin Putri Maheswari  
NIM : 20103070110  
Judul Skripsi : Fungsi Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia dalam Perspektif Islam

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.  
*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Juli 2024

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag  
NIP. 19681020 199803 1 002

## ABSTRAK

Salah satu fungsi adanya Partai Politik adalah menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang telah tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tertulis fungsi partai politik pada Pasal 11 ayat (1) huruf a. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak partai politik yang bermunculan dengan basis dukungan yang terpecah dan menyebabkan ketidak optimalan partai dalam menjaga sistem ketatanegaraan yang dapat mengakibatkan kelemahan dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap masyarakat dan akuntabilitas publik.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang mengkaji terkait hukum yang dikonsepsikan sebagai norma ataupun kaidah yang berlaku dalam masyarakat dengan melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*), yang dilakukan menggunakan literatur kepustakaan terdahulu dan beberapa sumber dari aturan perundang-undangan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Serta menganalisis terkait fungsi partai politik dalam sistem ketatanegaraan dalam sudut pandang Islam. Teori yang digunakan adalah teori sistem pemerintahan, Islam dan Demokrasi yang nantinya memiliki keterkaitan dengan sistem pemerintahan dan demokrasi dalam Islam.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketidak optimalan Partai Politik dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia diakibatkan oleh beberapa faktor seperti faktor internal dan faktor eksternal seperti persaingan antar politik, pemilihan ketua atau pemimpin partai berdasarkan kekuasaan, dan kurang maksimalnya dalam menyerap aspirasi masyarakat. Yang mana dalam menerapkan fungsinya berdasarkan *siyasah syar'iyah* Islam, hal ini memiliki ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip *siyasah syar'iyah* seperti amanah, musyawarah, keadilan, serta kedamaian.

**Kata Kunci :** *Fungsi Partai Politik, Sistem Ketatanegaraan, Siyasah Syar'iyah*

## ABSTRACT

*One of the functions of the Political Party is to create a climate conducive to the unity and unity of the Indonesian nation for the well-being of the people as set forth in the Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2011 on Amendments to the Law No. 2, 2008 on Political Parties. The function of the political party is written in Article 11 (1) letter a. However, over time, many political parties have emerged with a fragmented support base and cause the party's inadequacy inining the system of statehood which can lead to weaknesses in formulating responsive policies to society and public accountability.*

*The type of research used is normative jurisprudence or normative law research that studies the law conceived as the norm or the rule that applies in society by conducting data filling through library research, which is conducted using the literature of the previous library and some sources of the rules of legislation using the approach of normative juridic and legislative regulation. The theory used is the theory of the system of government, Islam and democracy, which later has a connection with the government system and democratic in Islam.*

*Based on the results of the research and analysis that has been carried out, it can be concluded that the inadequacy of the Political Party in the system of statehood in Indonesia is caused by several factors such as internal and external factors like inter-political competition, election of the chairman or leader of the party based on power, and the least maximum in absorbing the aspirations of the public. Which in applying its functions based on the Islamic law, it has inconsistencies with the principles of the Qur'an such as trust, peace, justice, and peace.*

**Keywords :** *Function of Political Parties, Constitutional System, Siyasaah Syar'iyah*

## MOTTO

*“Take the risk or lost the chance”*

Marko Halilovic

*“if u never bleed, u’re never gonna grow”*

Taylor Swift

*“Masa depan kita gemilang. The future is yours, do ur best.*

*Berbuat yang baik, jangan sakti orang”*

Prabowo Subianto

*“Teruslah mekar tanpa menjadi layu”*

JKT48

اجهد ولا تكسل، ولا تك غافلا. فندامة العقبى، لمن يتكسل

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orangtua penulis, Didik Setyo Utoro, S.H., M.M dan Mujiyati, S.E.
2. Kedua adik penulis, Lyra Arane Putri Utari dan Listuhayu Tristiana Wira Putri
3. Dan kepada teman-teman Saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu





## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan anugerah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan agung, Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan para sahabat. Sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan judul “Fungsi Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”. Penyusunan skripsi ini guna memperoleh gelar sarjana strata satu program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A, M. Phill., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Drs. Rizal Qosim, M.Si., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Hukum dan selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis..
4. Bapak Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis. Penulis haturkan terimakasih sebanyak-banyaknya karena telah meluangkan waktu, memberikan arahan dan bimbingan, serta memberikan kritik dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen beserta para staff Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Kedua orangtua tercinta, Bapak Didik Setyo Utoro, S.H., M.M., dan Ibu Mujiyati S.E., yang senantiasa selalu mendo'akan putri sulungnya tiada henti, selalu bekerja keras dan memberikan dukungan setiap saat.
7. Adik-adik penulis Lyra Ariane Putri Utari dan Listuhayu Tristiana Wira Putri yang selalu menunggu dan menyambut kakanya untuk pulang dengan penuh kebahagiaan.
8. Pemilik NIM 20103070030, Muhammad Nurul Aslam yang selalu memberikan dukungan, dan motivasi, menjadi pengingat dan pendengar keluh kesah, menemani dan memberikan dorongan dari awal perkuliahan hingga sekarang kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhr ini.
9. Kepada teman-teman alumni Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta meliputi Shafira Rasdiyanti Jamil, Nuril Madinah, Shofiyanti Elisa Putri, Nyimas Hazel, Shafa Disa Nabila dan Nauwal Izzah yang selalu memberikan dukungan, dan meluangkan waktunya untuk penulis baik ketika sedang melakukan tugas akhir maupun tidak, dan baik secara bertemu maupun hanya via daring dalam keadaan suka maupun duka.
10. Teman-teman yang membantu dan biasa mengerjakan skripsi bersama seperti Hany, Firda, Muhrizan, Ipungs, Towil, dan yang lainnya.
11. Keluarga SPBA meliputi Muchsin Nuralim, Sukmawati, Kurniyah Khalid dan teman-teman SPBA lainnya khususnya masa kepengurusan tahun 2023-2024 yang selalu memberikan support kepada penulis.
12. Teman-teman Disatya seperti Nadul, Wawa, Mei, Achsin, David, Ulil, Fajar, Tiqa dan Aul yang telah membantu support dalam segala situasi.
13. Keluarga besar Prodi Hukum Tata Negara angkatan 2020 yang telah mengukir cerita kehidupan yang amat berkesan selama masa perkuliahan dari daring hingga luring.
14. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me I wanna thank me for doing all these hard work, I wanna thank m for having no days off, I wanna thank*

*me for never quitting, I wanna thank me always being a giver n tryna give me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Penulis juga menyampaikan permintaan maaf sebanyak-banyaknya atas kekurangan, kesalahan, dan segala yang kurang berkenan dalam skripsi ini. Penulis akan menerima setiap masukan dengan senang hati, baik berupa kritik maupun saran mengenai skripsi ini



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan pada skripsi ini merujuk pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 1543b/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Ẓā'	Ẓ	zet titik di bawah

ع	'Ain	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

**B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:**

متعقدين	ditulis	muta‘aqqidīn
عدة	ditulis	‘iddah

**C. Tā' marbutah di akhir kata.**

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	Hibah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	ni'matullāh
زكاة الفطر	ditulis	zakātul-fitri

#### D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	ditulis	A
اِ	Kasrah	ditulis	I
اُ	Ḍammah	ditulis	U

#### E. Vokal Panjang:

1	fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	fathah + alifmaqṣūr يسعي	Ditulis	Ā yas'ā
3	kasrah + yamati مجيد	Ditulis	Ī Majīd
4	ḍammah + waumati فروض	Ditulis	Ū Furūd

#### F. Vokal Rangkap:

1	fathah + yāmāti بينكم	Ditulis	Ai Bainakum
2	fathah + waumati قول	Ditulis	Au Qaul

#### G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم	Ditulis	a'antum
اعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'insyakartum

#### H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	Ditulis	Asy-Syams
السماء	Ditulis	As-Samā'

### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	Zawi al-Furūd
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan.....</b>	<b>5</b>
<b>D. Telaah Pustaka.....</b>	<b>7</b>
<b>E. Kerangka Teori.....</b>	<b>10</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>13</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>15</b>
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN DALAM ISLAM DAN DEMOKRASI.....</b>	<b>16</b>
<b>A. Sistem Pemerintahan.....</b>	<b>16</b>
1. Pengertian Sistem Pemerintahan .....	16
2. Sistem Pemerintahan dalam Islam.....	20
3. Tujuan Pemerintahan .....	23
<b>B. Islam dan Demokrasi.....</b>	<b>24</b>
1. Pengertian Demokrasi.....	24



2. Hubungan Agama dan Demokrasi.....	25
<b>BAB III FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM .....</b>	<b>30</b>
<b>A. Gambaran umum tentang fungsi partai politik di Indonesia.....</b>	<b>30</b>
1. Pengertian umum partai politik .....	30
2. Sejarah Partai Politik di Indonesia.....	31
3. Fungsi dan Peran Partai Politik.....	33
4. Peraturan Perundang-Undangan terkait Partai Politik di Indonesia .....	41
5. Pengaruh Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia .....	48
<b>B. Partai Politik dalam Perspektif Islam.....</b>	<b>52</b>
1. Lahirnya Partai Politik dalam Islam .....	52
2. Hukum Mendirikan Partai Politik dalam Islam .....	54
3. Pandangan Islam tentang Politik .....	55
<b>BAB IV Analisis Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia : Perspektif Islam dan Fungsinya.....</b>	<b>60</b>
<b>A. Analisis Optimalisasi Fungsi Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan .....</b>	<b>60</b>
1. Kriteria dan indikator yang mempengaruhi partai politik .....	60
2. Analisis fungsi partai politik dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia .....	63
3. Faktor Hambatan dan Faktor Pendukung .....	66
<b>B. Analisis terhadap Partai Politik dalam menerapkan Perspektif Islam.....</b>	<b>70</b>
1. Prinsip-Prinsip <i>Siyasah Syar'iyah</i> .....	71
2. Pandangan <i>Siyasah Syar'iyah</i> terhadap Fungsi Partai .....	73
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>77</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>79</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Partai politik merupakan mesin serta salah satu pilar demokrasi<sup>1</sup> sebagaimana Indonesia yang merupakan negara demokrasi yang harus mengedepankan kedaulatan rakyat yang membutuhkan peran partai politik sebagai sarana menyalurkan aspirasi masyarakat karena, partai politik merupakan satu-satunya pihak yang dapat menerjemahkan kepentingan dan nilai masyarakat ke dalam legislasi serta kebijakan publik yang mengikat.<sup>2</sup> Sebagaimana yang telah tertera didalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar”. Karena memang hakikatnya demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dan tujuan dibentuknya negara guna mensejahterakan seluruh warga negara, bukan individu tertentu.<sup>3</sup>

Selaras juga dengan fungsi dan peranan partai politik yang sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tidak terlepas dari tujuan dan fungsi parpol dalam sistem politik demokrasi. Terdapat dalam Pasal 10 ayat (2) Undang - Undang Nomor 2 tahun 2011 disebutkan bahwa tujuan khusus Parpol yaitu (a) meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka

---

<sup>1</sup> Dian Aulia, Jurnal : Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia (Masyarakat Indonesia) Vol. 42, No.1, 2016, hlm. 115. Dinjauan dari buku karya Muhadam Labodo dan Teguh Ilham, Penguatan Demokrasi : *Partai Politik dan (Sistem Pemilu sebagai Pilar Demokrasi*, 2015. Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

<sup>2</sup> Thomas Meyer, Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi : Sembilan Tesis, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Kantor Perwakilan Indonesia 2012, hlm. 28

<sup>3</sup> Efriz, Ilmu Politik : dari Ilmu Politik sampai Sistem Pemerintahan, Bandung : Penerbit Alfabeta 2013, hlm. 62

penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; (b) memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan; (c) membangun etika dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Sedangkan fungsi partai politik sendiri sebagai sarana untuk pendidikan politik, menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa, penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi masyarakat, partisipasi politik dan rekrutmen politik sebagaimana yang tertera dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang ditujukan untuk memperjuangkan cita-cita partai politik pada pasal sebelumnya memiliki berbagai masalah internal maupun eksternal seperti seperti persaingan antar politik, pemilihan ketua atau pemimpin partai berdasarkan kekuasaan, dan kurang maksimalnya dalam menyerap aspirasi masyarakat yang menjadi penghalang bagi partai untuk memperjuangkan cita-citanya<sup>4</sup>

Jika dilihat dari fungsi serta peranan partai politik diatas, menunjukkan betapa pentingnya partai politik menjadi sarana untuk masyarakat dalam membentuk suatu organisasi dengan tujuan mewujudkan aspirasinya, yang kemudian diwujudkan dengan fungsi-fungsi politik itu sendiri, yaitu sebagai wadah rekrutmen politik dalam arti menyiapkan calon-calon anggota legislatif, meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan menciptakan iklim yang kondusif dalam proses Pemilu demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa jika dilihat dari segi regulasinya dan guna mencegah partai politik menjadi kerumunan politik saja, maka partai politik diharuskan membentuk pelembagaan politik agar menjadi efektif bukan hanya meliputi

---

<sup>4</sup> Muh. Iqbal Latief : Peran Parpol dalam Pemilu Legislatif, melalui <https://sulselprov.go.id/welcome/post/peran-parpol-dalam-pemilu-legislatif>, diakses pada 26 Oktober 2023

penguatan dari segi kapasitas ataupun sumber daya, tetapi juga merancangnya agar adaptif atau cocok dengan situasi.<sup>5</sup>

Namun, dalam proses penerapan untuk mencapai hakikat tujuan partai politik tersebut, ternyata masih jauh dari apa yang masyarakat harapkan. Pencapaian tujuan dari partai politik tersebut memiliki banyak hambatan, yang disebabkan oleh beberapa masalah internal dan eksternal yang menyebabkan fungsi partai politik bekerja secara tidak optimal.

Terdapat banyak partai politik yang bermunculan dengan basis dukungan yang terpecah, sehingga hal ini menyebabkan kesulitan untuk mencapai konsensus dan menghasilkan keputusan politik yang optimal. Hal ini juga sering mengakibatkan ketidakstabilan yang dapat menghambat implementasi kebijakan yang dibutuhkan oleh pembangunan negara. Ketidakoptimalan ini dapat mengakibatkan kelemahan dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan kurangnya akuntabilitas publik. Partai politik yang seharusnya menciptakan iklim kondusif, malah membuat terjadinya perpecahan. Beberapa para pemikir Islam seperti Dr. Dhiya'uddin Ar-Rais dan Abdul 'Ala al-Maududi memiliki pandangan yang pro dan kontra keterkaitan antara adanya partai politik dengan demokrasi Islam.

Permasalahan ini juga memiliki sudut pandang tersendiri apabila dilihat dari sisi keislamannya, yang mana Islam sendiri memerintahkan kita untuk memilih pemimpin yang amanah dan bisa berlaku adil dan meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pejabat ataupun pribadi. Dalam Islam sendiri kita mengenal sosok Utsman bin Affan r.a sebagai sosok khalifah yang tegas dalam mengatur negara agar tergapainya keadilan hukum dan kesejahteraan rakyat. Salah satu ketegasannya adalah

---

<sup>5</sup> Dadih Abdulhadi, Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai dalam Kerangka Pelembagaan Partai Politik

menghukum pejabat pemerintahan yang dianggap tidak becus dalam bekerja dan beliau tidak segan untuk menghukum mati pejabat yang melakukan tindak korupsi dan kejahatan besar lainnya yang berdampak pada negara, karena yang akan menjadi korban nantinya adalah rakyat.<sup>6</sup>

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'id<sup>7</sup>:

فمن سياسة عثمان الشرعية تغليب جانب مصلحة الناس على مصلحة الحاكم في ترك القتال مع الحاكم وإن كان الحق معه حتى لا يكثر القتل ويستمر. [رواه ابن سعد (٣/٤٣) و ابن أبي شبة في تاريخ المدينة (٢ / ١٧٩) باسنا دصحيح].

Dalam konteks kepemimpinan, Islam dengan tegas memerintahkan untuk mentaati Allah, Rasul, dan Ulil amri (yang mengurus urusan orang banyak). Tetapi dalam praktiknya, politik tersebut terdistorsi dengan paham bahwa politik identik dengan mendapatkan kekuasaan, sehingga tidak sedikit orang masuk politik bukan untuk menciptakan keadilan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, namun hanya sekedar untuk mendapatkan kekuasaan.<sup>9</sup> Hal tersebut yang menjadikan orang-orang dalam partai politik terlena akan kenikmatan duniawi.

Menurut Ramlan Surbakti, politik bukan hanya dipersepsi sebagai arena konflik dan perebutan kekuasaan, namun politik juga merupakan perumusan kebijakan dan pencapaian kepentingan umum. Disinilah politik memiliki makna yang bersinggungan

---

<sup>6</sup> Dr. Abd. Halim, M.A. Pidato Para Khalifah : Persoalan Negara, Demokrasi, dan Penegakan Hukum, hlm. 41, *Institute of Nation Development Studies (INDeS) Yogyakarta*, dan *Institute for Nusantara Studies (INNUS) Surabaya*, 2015

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 41 - 42

<sup>9</sup> Aripais, "Politik dalam Pandangan Islam", diakses melalui <https://jatim.kemenag.go.id/berita/535551/politik-dalam-pandangan-islam>

dengan dakwah dalam pengertian untuk mengembalikan manusia untuk menyembah Allah semata dengan memerintahkan kema'rufan dan mencegah kemungkaran.<sup>10</sup>

Maka dari itu, disini penulis tertarik untuk mengkaji terkait **Fungsi Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia dalam Perspektif Islam.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana fungsi partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011?
2. Bagaimana pandangan *siyasah syar'iyah* terhadap fungsi partai politik?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya :

- a. Bertujuan untuk memahami konsep keislaman dalam konteks politik. Hal ini melibatkan eksplorasi terhadap teori serta konsep yang berkaitan dengan pandangan Islam dan juga pemahaman mengenai bagaimana konsep tersebut akan diterapkan dalam fungsi partai politik yang ada di Indonesia.
- b. Penelitian ini akan menganalisis beberapa fungsi-fungsi partai yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik yang terdapat dalam Pasal 11 Ayat (1). Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami bagaimana Undang–Undang tersebut mengatur fungsi partai politik, termasuk persyaratan pendirian, struktur organisasi, dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh partai politik jika dilihat dari sudut pandang Islam.

---

<sup>10</sup> Sapto Waluyo, *Kebangkitan Politik Dakwah (Konsep dan Praktik Partai Keadlian Sejahtera di masa transisi)*, Bandung : Harakatuna Publishing (2005), hlm. 31.

- c. Menilai kesesuaian fungsi partai politik dengan konsep *siyasah syar'iyah* sejauh mana partai politik saat ini menerapkan prinsip dan nilai – nilai keislaman.

Dengan tujuan-tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fungsi partai politik dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia jika dilihat melalui pandangan keislaman.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta memberikan pengetahuan untuk berbagai pihak termasuk penulis sendiri dan juga memperbaharui penelitian sebelumnya terkait eksistensi partai politik di Indonesia. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan mampu memberikan informasi baru kepada pembaca terkait eksistensi partai politik dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, serta diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara.

### b. Kegunaan Praktis

#### 1) Bagi Pemerintah

Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan pengembangan bagi pemerintah dan pelaku politik baik di pusat maupun daerah di Indonesia.

#### 2) Bagi Penelitian Mendatang

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pengembangan pola pikir bagi pemerhati ilmu politik dan juga hukum ketatanegaraan terkait eksistensi partai politik dalam sistem ketatanegaraan.

#### D. Telaah Pustaka

Dalam penulisan penelitian ini, penulis terlebih dahulu mencari sumber – sumber penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dan bahan rujukan agar tidak memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Adapun hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan diteliti diantaranya sebagai berikut :

Pertama, penulis menggunakan artikel yang ditulis oleh Sirajuddin seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulani Manado yang berjudul “Eksistensi Partai Politik dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan di Indonesia”.<sup>11</sup> Artikel ini berisikan tentang pengaruh dan efektivitas partai politik dalam sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia yang membahas tentang tujuan umum serta tujuan khusus partai politik di Indonesia. Yang mana tujuan umum partai politik ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang memiliki peranan penting sebagai penghubung antar pemerintah negara (*the state*) dengan warga negaranya (*the citizen*). Persamaan artikel “Eksistensi Partai Politik dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan di Indonesia” dengan penelitian yang dikaji oleh penulis adalah membahas tentang peran dan fungsi partai politik dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan keduanya menganalisis partai politik dari sudut pandang hukum dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pembedanya adalah artikel “Eksistensi Partai Politik dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan di Indonesia” bersifat lebih umum dan deskriptif, sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah membahas lebih spesifik dengan menggunakan pendekatan hukum dan sudut pandang Islam.

---

<sup>11</sup> Sirajuddin, “Eksistensi Partai Politik dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan di Indonesia”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. IV/No. 1/Jan/2016



Kedua, skripsi yang ditulis oleh Cherlinda Hestiane Cahyani seorang mahasiswa dari program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Sosialisasi Politik dan Partisipasi Politik : Peran Kesbangpol terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kota Depok Tahun 2018”.<sup>12</sup> Isi dari skripsi ini adalah menganalisa tentang sosialisasi politik yang diselenggarakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk masyarakat Depok. Kesbangpol merupakan departemen pemerintahan yang mengurus bidang politik dan kesatuan bangsa yang secara konsisten berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya pemilih pemula dengan menyelenggarakan sosialisasi politik secara rutin untuk pelajar SMA sederajat di Kota Depok. Persamaan skripsi yang berjudul “Sosialisasi Politik dan Partisipasi Politik : Peran Kesbangpol terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kota Depok Tahun 2018” dengan penelitian yang dikaji oleh penulis adalah keduanya membahas topik yang berkaitan dengan partisipasi politik dan menganalisis peran lembaga ataupun organisasi terhadap partisipasi politik. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi yang berjudul “Sosialisasi Politik dan Partisipasi Politik : Peran Kesbangpol terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kota Depok Tahun 2018” menganalisis partisipasi politik dalam konteks pemilihan umum dan bersifat studi kasus di suatu daerah (Kota Depok), sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti menganalisis partisipasi politik dalam konteks sistem ketatanegaraan secara lebih luas dan bersifat analisis konseptual secara umum.

Ketiga, buku yang berjudul “Risalah Hukum dan Teori Partai Politik” yang ditulis oleh M. Iwan Satriawan. Buku ini membahas tentang dinamika partai politik di Indonesia yang tidak terlepas dari perubahan paradigma politik hukum, mekanisme

---

<sup>12</sup> Cherlinda Hestiane Cahyani, “Sosialisasi Politik dan Partisipasi Politik : Peran Kesbangpol terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kota Depok Tahun 2018”, Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2019)

pembubaran partai politik hingga dekontruksi partai politik di Indonesia. Persamaan buku ini dengan penelitian yang penulis kaji adalah membahas terkait eksistensi partai politik dalam hukum dan demokrasi pada salah satu sub-babnya. Sedangkan pembedanya, buku ini lebih berfokus pada kedudukan hukum partai politik dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan juga pendanaan partai sebagai salah satu sebab sumber korupsi di Indonesia.

Keempat, artikel karya Luh Yossi Shuartini Milenia dengan judul “Peran Hukum Tata Negara (Studi Kasus Pemilihan Umum di Indonesia)”.<sup>13</sup> Tulisan dalam artikel ini menggambarkan situasi politik di Indonesia ketika Pemilu Presiden 2014 dan merefleksikan lebih dalam terkait pengaruh serta respon pihak asing terhadap demokrasi tentang apa yang terjadi dalam proses pemilihan umum dan bagaimana Indonesia dapat menjadi contoh kisah sukses dari berbagai demokrasi identitas beragama seperti negara multikultural, berkembang, dan sebagai negara yang memiliki penganut Muslim terbesar di dunia. Persamaan dari artikel dengan judul “Peran Hukum Tata Negara (Studi Kasus Pemilihan Umum di Indonesia)” ini dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah membahas tentang sistem hukum tata negara di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pemilihan umum dan partai politik dan keduanya menganalisis tentang peran dan fungsi institusi-institusi penting dalam sistem ketatanegaraan. Adapun pembedanya adalah artikel “Peran Hukum Tata Negara (Studi Kasus Pemilihan Umum di Indonesia)” berfokus pada proses pemilihan umum di Indonesia, sementara penelitian yang diteliti oleh penulis berfokus pada fungsi partai politik dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Secara umum, kedua tulisan tersebut

---

<sup>13</sup> Luh Yossi Shuartini Milenia, Peran Hukum Tata Negara (Studi Kasus Pemilihan Umum di Indonesia), Jurnal : Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 3 No. 1, April 2021

membahas isu-isu penting terkait sistem ketatanegaraan di Indonesia, tetapi dengan focus dan pendekatan yang berbeda.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Muhammad Jafar AW yang berjudul “Peranan Partai Politik dalam Demokrasi di Indonesia”<sup>14</sup> seorang mahasiswa Program Studi Administrasi Publik dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten. Jurnal ini membahas tentang peranan partai politik yang tidak hanya berperan sebagai organisasi politik saja, tetapi juga memiliki peran dan tanggung jawab terhadap pendidikan politik kepada masyarakat, karena melalui pendidikan politiklah yang nantinya akan meningkatkan aspirasi masyarakat terhadap partai politik itu sendiri. Persamaan artikel ini dengan penelitian yang penulis kaji adalah saling membahas tentang peran dan fungsi partai dalam sistem ketatanegaraan, dan menganalisis tentang isu yang berkaitan dengan demokrasi dan sistem politik Indonesia, sedangkan perbedaannya adalah artikel ini tidak secara khusus membahas perspektif Islam, sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis menganalisis isu tersebut dari sudut pandangan Islam. Secara garis besar, kedua tulisan ini sama-sama membahas tentang isu terkait dalam partai politik dalam sistem politik dan demokrasi di Indonesia.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Sistem Pemerintahan**

Negara memiliki sistem pemerintahan yang menjadi dasar bagi keberlangsungannya dalam bernegara. Menurut Mhafud MD, sistem pemerintahan merupakan sebuah mekanisme kerja yang melibatkan koordinasi dan hubungan diantara tiga cabang kekuasaan seperti legislative, eksekutif dan yudikatif. Sistem

---

<sup>14</sup> Muhammad Jafar AW, Peranan Partai Politik dalam Demokrasi di Indonesia, Jurnal : Administrasi Publik Vol. 6 No. 2, 2015

pemerintahan ini berperan penting dalam mengatur dan mengelola negara agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>15</sup>

Menurut Hasan al-Banna, pemerintahan Islam merupakan pemerintah yang terdiri dari pejabat pemerintah yang beragama Islam serta menjalankan kewajiban dalam agama Islam, tidak melakukan maksiat dan melaksanakan hukum serta ajaran dalam agama Islam.<sup>16</sup> Sejak abad 7 Masehi sampai sekarang, umat Islam sebelumnya pernah menerapkan sistem pemerintahan khilafah (berdasarkan syura' dan monarki), *imamah*, monarki dan demokrasi yang erat kaitannya dengan keadaan masyarakat masing-masing. Hal ini dikarenakan kekhalifahan adalah pemerintahan Islam yang tidak terbatas pada wilayah, maka kekhalifahan Islam mencakup berbagai suku dan bangsa.

Pada hakikatnya, khilafah merupakan pemimpin yang menjalankan agama dan negara atas nama nabi. Menurut Ibnu Khaldun, Khilafah adalah kepemimpinan umum seluruh umat Islam di seluruh dunia untuk menegakkan hukum Syariah Islam dan menyebarkan risalah Islam ke seluruh dunia. Mempertahankan Khilafah adalah kewajiban seluruh umat Islam di seluruh belahan dunia. Memenuhi kewajiban tersebut sama dengan memenuhi kewajiban yang diamanatkan Allah kepada seluruh umat Islam. Kegagalan mendirikan Khilafah adalah dosa (kemaksiatan) dan Allah akan menjatuhkan siksa yang paling pedih.

---

<sup>15</sup> Mochamad Aris Yusuf, Apa itu Sistem Pemerintahan? Berikut Penjelasannya, diakses melalui [Apa itu Sistem Pemerintahan? Berikut Penjelasannya - Gramedia Literasi](#) pada 1 Agustus 2024

<sup>16</sup> Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, Fiqih Politik Hasan al-Banna, Terjemah Odie al-Faeda, Solo: Media Insani (2003), hlm. 39.

## 2. Islam dan Demokrasi

Demokrasi bersifat universal yang berarti berlakusepanjang waktu dan zaman serta fleksibel dan tidak statis. Sebagian besar masyarakat Muslim di Indonesia menerima konsep demokrasi yang sesuai dengan nilai yang terkandung dalam *syura*. Bagi masyarakat Muslim di Indonesia, *syura* tidaklah hanya sebagai seruan Tuhan, akan tetapi sudah menjadi tradisi dan budaya masyarakat Indonesia.

Dari konsep *syura* dalam ajaran Tuhan ataupun telah dijadikan sebagai tradisi, dibangunlah demokrasi Pancasila yang bersumber dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila yang terdapat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Dasar Negara Indonesia. Yang mana isi dari sila pada Pancasila sendiri menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam dan asas musawah mufakat dalam berbagai urusan bernegara.<sup>17</sup> Dalam QS. As-Syura ayat 38<sup>18</sup>:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

dan penggalan dari QS. Ali Imran ayat 159<sup>19</sup> :

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ

Pada zaman khulafaurrasyidin, ahl halli wa-l'aqdi adalah lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana *syura* dalam kehidupan Islam. Organisasi ini lebih mirip dengan tim formatur yang memilih khalifah atau kepala negara. Musyawarah sangat penting untuk mencapai kesepakatan dan memikul tanggung jawab bersama dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, semua orang akan bertanggung jawab atas keputusan pemerintah. Sudut pandang

---

<sup>17</sup> Saifullah Idris, artikel Islam dan Demokrasi : Respon Umat Islam Indonesia terhadap Demokrasi, hlm.24

<sup>18</sup> QS. As-Syura : 38

<sup>19</sup> QS. Ali-Imran (3) : 159

musyawarah juga menunjukkan penghargaan terhadap orang lain karena pendapat yang disampaikan menjadi pertimbangan bersama. Sebagai bukti betapa pentingnya musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat, baik di tingkat bangsa maupun negara, Nabi Muhammad sendiri mengajarkan musyawarah kepada umatnya.<sup>20</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam proses pengumpulan data penelitian, penulis menggunakan beberapa metode penelitian, sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang mengkaji terkait hukum yang dikonsepsikan sebagai norma ataupun kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan yang menjadi sebagai acuan perilaku setiap orang.<sup>21</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan penelitian yang dibahas. Kemudian data yang telah diperoleh, disusun kemudian dianalisis secara sistematis.

### 3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature yang berkaitan dengan permasalahan

---

<sup>20</sup> M. Zainuddin, Islam dan Demokrasi diakses melalui ISLAM DAN DEMOKRASI – Prof. Dr. M. Zainuddin, MA (uin-malang.ac.id) pada 5 November 2023

<sup>21</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, hlm. 29

yang diteliti<sup>22</sup> dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan yang menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>23</sup>

#### 4. Jenis Data

##### a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara yang mana dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Dasar Pasal 6A Ayat (2), Pasal 8 Ayat (3), Pasal 22E Ayat (3), dan Pasal 24C Ayat (1) yang memiliki keterkaitan dengan wewenang partai politik sebagai sumber bahan hukum primer.

##### b. Bahan hukum sekunder

Merupakan sumber pendukung berupa data-data yang membahas terkait partai politik dari buku, jurnal maupun literatur hukum yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti yang berisikan prinsip dasar atau asas hukum, pandangan para ahli hukum.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*), yang dilakukan menggunakan literatur kepustakaan berupa buku, jurnal, artikel dan penelitian terdahulu.

---

<sup>22</sup>Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Haura Utama (2022), hlm. 55

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 57

## G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, penulis membagi penelitian secara sistematis ke dalam 5 bab. Adapun isi dari kelima bab tersebut sebagai berikut :

*Bab pertama*, yang merupakan desain penelitian berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab selanjutnya membahas teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori sistem pemerintahan dalam Islam dan Islam dan demokrasi. Pemaparan selanjutnya secara detail membahas terkait fungsi partai dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Dasar Pasal 6A Ayat (2), Pasal 8 Ayat (3), Pasal 22E Ayat (3), dan Pasal 24C Ayat (1) yang memiliki keterkaitan dengan wewenang partai politik. Pembahasan berikutnya berisi tentang pemaparan hasil penelitian mengenai analisis partai politik dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia : perspektif Islam dan fungsinya. Dan terakhir merupakan penutup yang memuat kesimpulan jawaban atas rumusan masalah yang dicari dalam penelitian ini, serta saran penulis mengenai permasalahan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ketidak optimalan partai politik dalam menjalani fungsinya disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal yang dialami oleh partai tertentu. Salah satu faktor internal dalam menerapkan fungsi partai menjadi sarana pendidikan politik bagi masyarakat dapat dikatakan kurang optimal adalah karena kurangnya sosialisasi partai dalam memberikan pengetahuan terkait pencoblosan pemilu kepada masyarakat, hal ini menyebabkan banyaknya masyarakat yang masih bingung dengan prosedur pencoblosan. Kemudian faktor eksternal yang dialami oleh partai adalah dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi negara juga dapat dikatakan kurang optimal dikarenakan masih sering terjadinya persaingan antar partai. Adapun faktor pendukung yang terdapat membantu partai politik dalam mengoptimalkan fungsinya anatara lain melalui visi, misi dan ideologi partai politik karena dapat membantu partai politik dalam merumuskan tujuan jangka panjang dan ideologi yang konsisten dapat menjadi panduan dalam pembentukan program dan kebijakan partai politik, selanjutnya adalah kepemimpinan karena memimpin dengan integritas dapat memotivasi anggota partai dan membangun kepercayaan dari masyarakat. Kemudian komunikasi dan kampanye dengan anggota partai dan masyarakat, serta melibatkan anggota dalam proses pengambilan keputusan, responsif terhadap aspirasi masyarakat, dan terakhir adalah keberlanjutan dan adaptabilitas. Partai politik yang mampu bertahan dan beradaptasi dengan perubahan konteks politik, sosial, dan ekonomi memiliki peluang yang lebih baik dalam menerapkan fungsi partai untuk kedepannya dan dapat mempertahankan eksistensinya. Sedangkan faktor penghambatnya adalah

persaingan politik, terbatasnya sumber daya, baik dari segi finansial, tenaga kerja, ataupun infrastruktur karena dapat membatasi kemampuan partai politik untuk melakukan kampanye politik yang efektif. Faktor penghambat selanjutnya adalah korupsi dan mengutamakan kepentingan pribadi yang mengakibatkan partai politik dapat kehilangan legitimasi dan gagal dalam mencapai tujuan mereka serta dapat melemahkan demokrasi.

2. Pandangan *siyasah syar'iyah* ataupun segi keislaman dalam menilai fungsi partai politik saat ini sudah sesuai dengan perspektif Islam jika dilihat dari aturan yang tertulis. Namun dalam penerapannya, masih banyak anggota ataupun kader-kader yang melanggar syari'at keislaman dan jika dilihat dari perspektif Islam, pendidikan politik memiliki peran penting dalam menanamkan kesadaran warga negara akan hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka dalam memajukan negara berdasarkan nilai-nilai etika, moral, dan keadilan. Selain itu, dalam menciptakan iklim yang kondusif oleh partai politik bagi persatuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia juga memiliki peran penting karena sejalan dengan adanya dengan prinsip-prinsip syar'iyah seperti keaslahatan umum, keadilan dan juga musyawarah. Kemudian partai politik sebagai penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan negara juga berperan penting dikarenakan sejalan dengan prinsip musyawarah dan perwakilan rakyat dalam sistem pemerintahan, terutama dalam sistem pemerintahan dalam Islam. Selanjutnya partai politik yang berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat juga tak kalah penting karena memiliki peran dalam mewujudkan keterlibatan aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan dan pembentukan kebijakan publik. Terakhir, partai berfungsi sebagai wadah rekrutmen politik dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender dalam proses pengisian jabatan politik berperan

penting dalam mewujudkan representasi yang adil dan inklusif sesuai dengan prinsip keadilan dan musyawarah.

## **B. Saran**

1. Pemerintah harus dengan tegas memberikan sanksi kepada kader, anggota ataupun partai tertentu yang melanggar peraturan. Karena, hal tersebut dapat berakibat fatal bagi partai politik itu sendiri dalam menerapkan fungsinya yang nantinya akan berdampak pada kestabilan dalam sistem ketatanegaraan dan diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan terhadap masyarakat. Dengan diterapkannya sanksi yang jelas, diharapkan dapat memberikn efek jera terhadap anggota ataupun kader yang melanggar peraturan.
2. Dalam melakukan pemilihan ketua ataupun pemimpin partai harus lebih demokratis dan tidak berdasarkan keturunan, ataupun memiliki kuasa yang lebih tinggi. Jika memang perlu, harus diberlakukannya aturan tertulis dalam undang-undnag yang mengatur mekanisme demokrasi yang dilakukan oleh internal partai unruk memilih ketua atau pemimpin dan pengurus partai.
3. Untuk kedepannya, partai-partai politik di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan komitmennya dalam mengimplementasikan perspektif Islam secara lebih efektif dan komprehensif sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

- QS. Ali-Imran (3) : 159
- QS. An-Nisaa (4) : 35
- QS. An-Nisaa (4) : 59
- QS. An-Nisaa (4) :58
- QS. As-Syura (42) : 15
- QS. As-Syura (42) : 38

### 2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar1945

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

### 3. Buku

Adiwilaga, Rendy., dkk. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit Depublish, 2018.

Amsari, Feri dan Charles Simabura, dkk. *Pembaruan Partai Politik di Indonesia (Demokratisasi Internal Partai Politik)*, Malang : Intrans Publishing, 2020.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (edisi revisi), Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2023.

Efriz. *Ilmu Politik : dari Ilmu Politik sampai Sistem Pemerintahan*, Bandung : Penerbit Alfabeta, 2013.

Faris, Muhammad Abdul Qadir Abu. *Fiqih Politik Hasan al-Banna*, Terjemah Odie al-Faeda, Solo: Media Insani, 2003.

Halim, Abd. *Pidato Para Khalifah : Persoalan Negara, Demokrasi, dan Penegakan Hukum, Institute of Nation Development Studies (INDeS) Yogyakarta, dan Institute for Nusantara Studies (INNUS)*, Surabaya, 2015.

Meyer, Thomas. *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi : Sembilan Tesis*, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Kantor Perwakilan Indonesia, 2012.

Waluyo, Sapto. *Kebangkitan Politik Dakwah (Konsep dan Praktik Patai Keadlian Sejahtera di masa transisi)*, Bandung : Harakatuna Publishing, 2005.

#### 4. Jurnal/Skripsi/Makalah

- Abdulhadi, Dadih. "Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai Dalam Kerangka Pelembagaan Partai Politik.", Simposium Nasional Hukum Tata Negara (2019)
- Abu, M. Taufik dan Ardillah. Islam dan Demokrasi, Moserasi : Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. I, No. I
- Atmoko, Ferizal Dwi. Analisis Fungsi Partai Politik Islam dalam menerima Aspirasi Masyarakat Muslim (Studi Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Purbalingga), Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2022.
- Adan, Hasanuddin Yusuf. Artikel Partai Politik dalam Perspektif Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Amin, Muryanto. artikel Navigasi Dinamika Politik di Indonesia, Universitas Sumatera Utara
- Amsari, Amsari dan Charles Simabura, dkk. Pembaruan Partai Politik di Indonesia (Demokratisasi Internal Partai Politik), Malang : Intrans Publishing (2020)
- Ardiansyah, Atih. Modul Perkuliahan Pengantar Ilmu Politik, Universitas Sultan Agung Tirtayasa (2021)
- Arfiansyah, Khidrian. Persaingan Ketat di Pemilihan Umum 2024 ndonesia : Tantangan dan Peluang untk Partai Politik
- Artikel Keberagamaan : Agama, Politik, dan Demokrasi, diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/04/04/agama-politik-dan-demokrasi>
- Peran Partai Politik dalam Membentuk Kebijakan Pemerintah (Oktober 2023), Biro Administrasi Kepegawaian, Karir dan Informasi (BAKRI) Universitas Medan Area
- Aulia, Dian., "Penguatan Demokrasi : Partai Politik dan (Sistem) Pemilu sebagai Pilar Demokrasi",. Dinjauan dari buku karya Muhadam Labodo dan Teguh Ilham, 2015. Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis. Jakarta: Raja Grafindo Persada, *Jurnal : Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia (Masyarakat Indonesia)* Vol. 42, No.1 (2016)
- Cahyani, Cherlinda Hestiane. "Sosialisasi Politik dan Partisipasi Politik : Peran Kesbangpol terhadap Pertisipasi Politik Pemilih Pemula di Kota Depok Tahun 2018", *Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (2019)
- Fauzi Almubarak : Keadilan Dalam Perspektif Islam, Jurnal Istighna, Vo. 1, No. 2 (Juli, 2018)

- Hadi,Otho H. “Peran Masyarakat Sipil dalam Proses Demokrasi”, *Jurnal Markara Human Behavior Studies in Asia*, Vol. 4 No. 2 (2010)
- Harahap, Solehuddin. Siyasah Syar’iyyah dalam Perspektif Islam, *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember (2022)
- Harjanto, Nico. “Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia”, *Aanalisis CSIS*, 40. .2. (2011)
- Ibnu Taimiyyah, *Majmu’ al-Fatwa*, Juz VI
- Idris, Saifullah., artikel Islam dan Demokrasi : Respon Umat Islam Indonesia terhadap Demokrasi
- Jafar, Muhammad., “Peranan Partai Politik dalam Demokrasi di Indonesia”, *Jurnal : Administrasi Pblk* Vol. 6 No. 2 (2015)
- Lavan, Yohana Oktaviani, dkk., Implementasi Nilai-Nilai Islam dalam Dinamika Politik Indonesia
- Mariana, Dede., Neneng Yani Yuningsih, S.IP., M.Si., dan Caroline Paskarina, S.IP., M.Si. Modul 1 : Pengertian, Ruang Lingkup, Tujuan, dan Manfaat Perbandingan Pemerintahan
- Menko Polhukam Tegaskan Sistem Pemerintahan Indonesia Sudah Benar melalui Menko Polhukam Tegaskan Sistem Pemerintahan Indonesia Sudah Benar (polkam.go.id)
- Milenia,Luh Yossi Shuartini., “Peran Hukum Tata Negara (Studi Kasus Pemilihan Umum di Indonesia)”, *Jurnal : Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3 No. 1, April (2021)
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press
- Rahmawati, Sistem Pemerintahan Islam menurut Al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia
- Sirajuddin, “Eksistensi Partai Politik dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan di Indonesia”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. IV/No. 1, Januari (2016)
- Susanto, Amin Heri. Artikel Hukum Mendirikan Partai Politik Perspektif Islam : Refleksi Islam Partai Politik Klasik dan Modern, *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 11 No. 1, Juni 202
- Yehezkiel, Pascal Wilmar dan Muazidan Takalamingan, Peran Partai Politik Mengatasi Politik Identitas dalam Pemilu, *Electoral Governance : Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol 4, No. 2 (2023)

## 5. Internet

Ahdiyana, Marita. Peran Partai Politik dalam Mengembangkan Kepemimpinan Transformati, diakses melalui [peran-partai-politik-dalam-mengembangkan-kepemimpinan-transformatif.pdf \(uny.ac.id\)](#)

Al-Qur'an dan Hadis tentang Etika dan Moralitas dalam Pandangan Islam. Diakses melalui [Al quran hadis tentang etika dan moralitas dalam pandangan Islam - Kajian Al-Qur'an Hadis \(kajianalquranhadis.com\)](#)

Amin, Kamaruddin. Agama dan Negara, diakses melalui <https://kemenag.go.id/opini/agama-dan-negara-bzc51k>

[Apakah yang dimaksud dengan sistem referendum? - Politik & Pemerintahan - Diction Community](#)

Aripais, *Politik dalam Pandangan Islam*, diakses melalui <https://jatim.kemenag.go.id/berita/535551/politik-dalam-pandangan-islam>

Arromadhoni, M. Najih. Tujuh Prinsip Politik Islam dalam Al-Qur'an. Diakses melalui [Tujuh Prinsip Politik Islam dalam Al-Quran, Simak Penjelasannya \(tafsiralquran.id\)](#)

Ayu, Monica. "Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Campuran", diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/27/04000091/ciri-ciri-sistem-pemerintahan-campuran>

Cindy Mutia Annur, Berapa Banyak Wara yang Percaya Partai Politik? Ini Hasil Surveynya, diakses melalui [Berapa Banyak Warga yang Percaya Partai Politik? Ini Hasil Surveinya \(katadata.co.id\)](#)

Corruption Perceptions Index 2023, Transparency International Indonesia, diakses melalui [CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2023 – Transparency International Indonesia](#)

<https://polpum.kemendagri.go.id/partai-politik-pemilih-dan-pendidikan-politik/>

[Sejarah Politik Indonesia: Gonta-ganti Sistem Pemerintahan hingga Menjamurnya Partai Politik - ERA.ID](#)

Ensiklopedia Islam, Siyasah Syar'iyah. Diakses melalui [Siyasah Syar'iyah - Ensiklopedia Islam](#)

Etika Moral dan Akhlak dalam Islam : Membangun Harmoni dalam Kehidupan Sehari-Hari. Diakses melalui [Etika Moral dan Akhlak dalam Islam: Membangun Harmoni dalam Kehidupan Sehari-Hari - Telusuri Nusantara](#)

<https://polkam.go.id/pentingnya-pendidikan-politik-dalam-menangkal-hoaks-jelang-pemilu-2024/>

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19513&menu=2#:~:text=Terdapat%20tujuan%20dari%20sebuah%20pemerintahan,perdamaian%20abadi%20dan%20keadilan%20sosial>

Indikator : Peran Calon Partai Penting dalam Pilihan pada Pileg 2024, Media Antara (Kantor Berita Indonesia), diakses melalui Indikator: Peran calon partai penting dalam pilihan pada Pileg 2024 - ANTARA News

Iryanto, Ignas. Demokrasi Internal Partai dan Peran Negar, diakses melalui Demokrasi Internal Partai dan Peran Negara (beritasatu.com)

Kamil, Irfan dan Sabrina Asril. Survei Indikator : Kepercayaan Publik terhadap Parpol Konsisten Plain Rendah, diakses melalui Survei Indikator: Kepercayaan Publik terhadap Partai Politik Rendah Halaman all - Kompas.com

Kebijakan Politik Nabi Muhammad SAW, diakses melalui Kebijakan Politik Nabi Muhammad SAW (nu.or.id)

Khairil Mahpuz, Partai Politik : Asas, Tujuan/Fungsi, Hak/Kewajiban, dan Larangan, diakses melalui PARTAI POLITIK: ASAS, TUJUAN/FUNGSI, HAK/KEWAJIBAN, DAN LARANGAN - Website Resmi Desa Banjarsari (banjarsari-labuhanhaji.desa.id)

Kompas.com : Partai Politik dan Sejarah Kelahirannya di Indonesia

Kris Nugroh, Masalh Sumber Daya Politik (2023), diakses melalui Masalah Sumber Daya Partai Politik - Kompas.id

Kurnia Yunita Rahayu, DPR Akui Belum Optimal Serap Aspirasi Publik. Diakses melalui [DPR Akui Belum Optimal Serap Aspirasi Publik - Kompas.id](#)

Kurniawan, Aris. Ideologi Politik - Pengertian, Macam, Pancasila, Fungsi, Sosialisme, Para Ahli, diakses melalui Ideologi Politik - Pengertian, Macam, Fungsi, Para Ahli (gurupendidikan.co.id)

Latief, Muh. Iqbal. Peran Parpol dalam Pemilu Legislatif, melalui <https://sulselprov.go.id/welcome/post/peran-parpol-dalam-pemilu-legislatif>

Madina, Nazhril Fathra. diakses melalui <https://nu.or.id/sirah-nabawiyah/kebijakan-politik-nabi-muhammad-saw-ZPt>

*Maqashid, Fiqh.* (3): Kemaslahatan adalah Inti Syari'at Islam. Diakses melalui Fiqih Maqashid (3): Kemaslahatan adalah Inti Syariat Islam (nu.or.id)

Nadhifah Dyah Kumala, Demokrasi : Pengertian, Tujuan, Prinsip, dan Contohnya di Indonesia diakses melalui [Demokrasi: Pengertian, Tujuan, Prinsip dan Contohnya di Indonesia | DailySocial.id](#)

Nasrullah, Nashih. Keadilan dan Kesejahteraan Tugas Peimpin dlam Islam. Diakses melalui Keadilan dan Kesejahteraan Tugas Pemimpin Menurut Islam | Republika Online



- Nur Andini Sari, Stabilitas Politik : Pondasi bagi Pertumbuhan dan Kesejahteraan (November, 2023), Fuad Harmoni diakses melalui Stabilitas Politik: Pondasi bagi Pertumbuhan dan Kesejahteraan - Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Parepare
- Nurhadi, Ini Syarat Mendirikan Parpol Baru dan Menjadi Peserta Pemilu, diakses melalui Ini Syarat Mendirikan Parpol Baru dan Menjadi Peserta Pemilu - Nasional Tempo.co
- Partisipasi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Peningkatan Kualitas Politik di Indonesia, diakses melalui Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Partisipasi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Peningkatan Kualitas Politik di Indonesia (setkab.go.id)
- Partisipasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Peningkatan Kualitas Politik di Indonesia, oleh Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, diakses melalui Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Partisipasi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Peningkatan Kualitas Politik di Indonesia (setkab.go.id)
- Pemilu tanpa Pendidikan Politik, diakses melalui [Pemilu Tanpa Pendidikan Politik – P4M \(unas.ac.id\)](#)
- Rangkuti, Ry. Luka akibat Politik Identitas DKI 2017 Belum Sembuh, diakses melalui : [Ray Rangkuti: Luka akibat Politik Identitas Pilkada DKI 2017 Belum Sembuh \(kompas.com\)](#)
- Raynard Kristian Bonanio Pardede, Visi dan Misi Partai Jadi Alasan Utama Memilih. Diakses melalui Visi dan Misi Partai Jadi Alasan Utama Memilih - Kompas.id
- [Serba-serbi Partai Politik: 5 Fungsi Parpol dalam Negara Demokrasi - Nasional Tempo.co](#)
- Survei LSI Soal Kepercayaan Publik : DPR dan Parpol Urutan Paling Buncit, diakses melalui Survei LSI Soal Kepercayaan Publik: DPR dan Parpol Urutan Paling Buncit - Nasional Tempo.co
- Tafsir Al-Qur'an Surah Asy-Syura ayat 15, diakses melalui [Tafsir Surah Asy-Syura Ayat 15 seruan agar tidak terpecah-pecah \(tafsiralquran.id\)](#)
- Tahun 2022 : Memantapkan Stabilitas Politik, diakses melalui Tahun 2022: Memantapkan Stabilitas Politik - Kompas.id
- Topan, Rendra : Partai Politik dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia, diakses melalui Partai Politik dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia | Hukum Positif Indonesia (rendratopan.com)
- Tri Jata Ayu Pramesti, S.H., Fungsi Partai Politik. Diakses melalui [Fungsi Partai Politik \(hukumonline.com\)](#)

Yusuf, Moch. Aris. “Apa Itu Sistem Pemerintahan?” Diakses melalui <https://www.gamedia.com/literasi/apa-itu-sistem-pemerintahan/>

Yusuf, Moch. Aris. “Pengertian Sistem Pemerintahan Presidensial dan Ciri-Cirinya”, diakses melalui <https://www.gamedia.com/literasi/sistem-pemerintahan-presidensial/>

Yusuf, Moch. Aris. “Sistem Pemerintahan Parlemeter: Pengertian, Ciri-ciri, Kelebihan dan Kekurangannya”, diakses melalui [Sistem Pemerintahan Parlemeter: Pengertian, Ciri-ciri, Kelebihan, dan Kekurangannya - Gramedia Literasi](#)

Zainuddin, “Islam dan Demokrasi”, diakses melalui ISLAM DAN DEMOKRASI – M. Zainuddin, MA (uin-malang.ac.id)

